



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Selain berada di tengah Provinsi Riau, Pekanbaru juga berada di lintasan jalur transportasi darat Pulau Sumatera. Hal ini menyebabkan Pekanbaru mempunyai lokasi yang strategis, dan akan semakin strategis seiring dengan perkembangan pembangunan di wilayah Sumatera maupun perkembangan di Malaysia dan Singapura.

Sebagian lahan Kota Pekanbaru mempunyai ciri formasi minas yang karakteristiknya lebih baik namun memiliki kandungan mineral lempung kaolinit yang mempunyai sifat porositas tanah rendah, yang dapat menahan senyawa aluminium, sehingga tanah bersifat asam dan sangat korosif terhadap material logam. Akibat kondisi geologi ini jenis tanah di Kota Pekanbaru bervariasi, antara lain alluvial hidromorf, alluvial coklat kekuningan, alluvial kelabu dan tanah-tanah yang berasosiasi, yaitu perpaduan dua jenis tanah yang sulit dibedakan.

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Pekanbaru mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pada tahun 2004 jumlah hari hujan di Kota Pekanbaru sebanyak 209 hari, dengan curah hujan rata-rata 306,39 mm dan temperatur berkisar antara minimum 26,9° C sampai dengan maksimum 29,3° C.

4.1.1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura.

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru dan pada tahun 1958,

Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen.

4.1.2. Sistem Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Secara administrasi pemerintahan Kota Pekanbaru dikepalai oleh Walikota, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dimekarkan dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadi 12 wilayah administrasi Kecamatan. Wilayah administrasi Kecamatan selanjutnya terbagi lagi menjadi Kelurahan, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, dimekarkan dari 50 wilayah administrasi kelurahan menjadi 58 wilayah administrasi kelurahan. Wilayah administrasi kelurahan terbagi lagi menjadi 539 Rukun Warga (RW) dan 2.266 RT (Rukun Tetangga). Populasi penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan Tahun 2012 menurut Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru mencapai 903.902 jiwa.

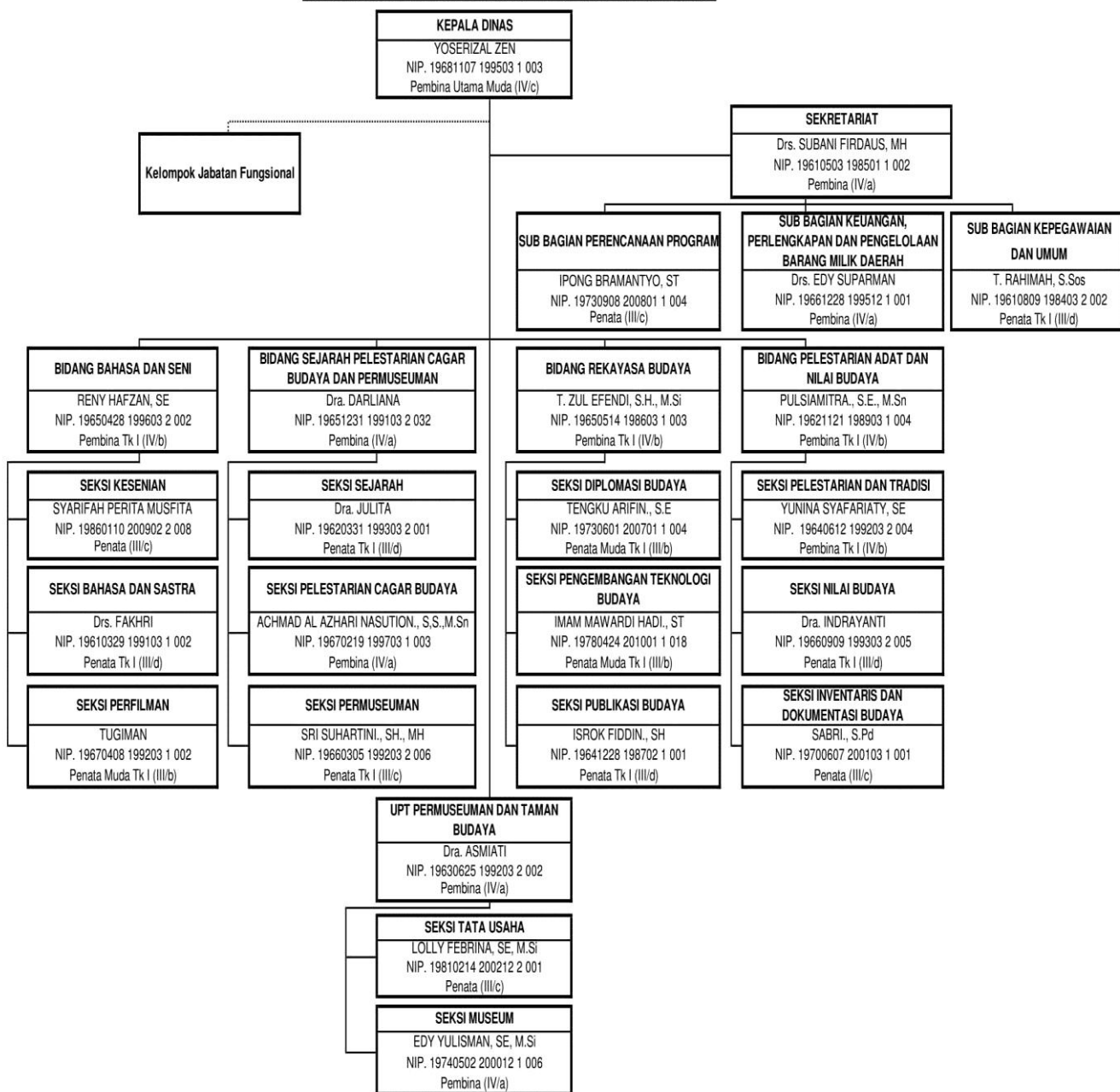
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebelumnya tergabung dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Namun sejak keluarnya Peraturan Gubernur Riau No 4 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Maka Dinas Kebudayaan berpisah dari Dinas Pendidikan dan diberi nama menjadi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Pada saat ini Dinas Kebudayaan berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 194, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Tepatnya yaitu dibelakang Museum Sang Nila Utama. Selanjutnya berikut susunan struktur organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU



4.2.1. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Visi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yaitu: Terwujudnya Dinas Kebudayaan Sebagai Pusat Pelestarian, Pendokumentasian dan Pengembangan Budaya Melayu guna memperkuat karakter dan jati diri bangsa menuju masyarakat berbudaya dan sejahtera, berbasis teknologi informasi dalam lingkup

1. Hak
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Agamis. Adapun misi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelestarian adat, nilai budaya dan masyarakatnya melalui inventarisasi dan pendokumentasian;
2. Menjadikan riau sebagai pusat bahasa dan seni budaya melayu di asia tenggara;
3. Menjadikan diplomasi dan publikasi budaya melayu berbasis teknologi informasi;
4. Menjadikan riau sebagai pusat sejarah, cagar budaya dan pengembangan permuseuman;
5. Menjadikan riau sebagai pengumpul, perawat serta penyaji warisan benda dan takbenda seni budaya melayu.

4.2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Dinas Kebudayaan Merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah. Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud melaksanakan penyelenggaraan

Fungsi Dinas Kebudayaan Privinsi Riau yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya;
4. pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

4.3 Museum Sang Nila Utama

Museum Sang Nila Utama dikelola Oleh UPT Museum dan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Museum Sang Nila Utama berlokasi di Tangkerang Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No.194, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Museum Sang Nila Utama merupakan museum warisan di Pekanbaru. Museum ini mengumpulkan dan menyimpan warisan-warisan yang berhubungan dengan budaya -budaya Melayu seperti pakaian adat pernikahan, bentuk rumah adat, mata uang kuno, binatang yang diawetkan, naskah kuno, permainan tradisional, instrument-instrumen musik dan artefak-artefak tradisional lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.1 Sejarah Museum Saang Nila Utama

Sejak berdirinya Provinsi Riau, dibentuk Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau yang menangani masalah pendidikan dan kebudayaan dipusat. Masalah kebudayaan pada saat itu belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh termasuk didalamnya masalah permuseuman.

Banyaknya benda budaya maupun benda yang menjadi sumber daya alam yang patut dilestarikan di Riau, menyebabkan pemerintah daerah Riau menganggarkan pengumpulan benda-benda tersebut secara bertahap sejak tahun anggaran 1977/1978. Setelah sarana dan prasarana dianggap memadai maka ditetapkan sebagai Museum Negri Provinsi Riau (Museum Sang Nila Utama) dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 001/01/1991 tanggal 09 Januari 1991. Saat itu kepala museum masih dirangkap dalam Bidang Permuseuman Sejarah dan Perbukalaan Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 mei 1993 Nomor 28267/A2.1.2/C/93 maka diangkatlah bapak H. A Rahman DS sebagai kepala museum pimpinan yang defenitif (telah resmi ditetapkan).

Pada tanggal 9 Juli 1994 Prof. DR Edi Sedyawati sebagai direktur jendral kebudayaan pada saat itu meresmikan Museum Negri Provinsi Riau bersamaan dengan pameran museum Negri Provinsi se Sumatera dan sekaligus dalam rangka ikut merayakan Musabaqqah Tilawatil Qur'an (MTQ) nasional tingkat ke-17 di Pekanbaru.

Pada tahun 1977/1978 Museum Daerah Riau baru memiliki 40 koleksi. Jumlah koleksi museum dari tahun ketahun terus bertambah, sampai tahun 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koleksi museum sudah berjumlah 4195.000 buah. Berdasarkan klasifikasi koleksi museum umum yang diterbitkan oleh Direktorat Permuseuman tahun 1993 yang merupakan pengklasifikasian penggolongan koleksi atas kriteria koleksi yang bersifat konfensif (kesepakatan yang tidak tertulis).

4.3.2 Visi dan Misi Museum Sang Nila Utama

A. Visi

Mewujudkan museum yang mandiri guna memajukan kebudayaan daerah sehingga tercapai kemajuan adab, memiliki jati diri, kebanggaan daerah yang akhirnya akan lebih menumbuhkan persatuan Bangsa

B. Misi

1. Membina dan mengembangkan museum sebagai upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya daerah;
2. Membina dan mengembangkan museum sebagai upaya kepentingan penelitian, pendidikan, dan rekreasi

4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Museum Sang Nila Utama

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Museum dan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya UPT Museum dan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
3. Mengkoordinasi dan melakukan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan perpustakaan dan dokumentasi;
5. Mengkoordinasikan dan melakukan tugas- tugas ketata usahaan;
6. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan masyarakat;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4.3.4 Struktur Organisasi UPT Museum dan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Struktur organisasi adalah suatu kerangka dasar yang menunjukkan dengan jelas hubungan antar bidang yang satu dengan bidang yang lain. Struktur organisasi UPT Museum dan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagai Pengelola Museum Sang Nila Utama yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Museum dan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
2. Kepala Subbag Tata Usaha UPT Museum dan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Seksi Museum UPT Museum dan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

**Struktur Organisasi UPT Museum dan Taman Budaya Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau**

